

**KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH LUWU TIMUR TERHADAP
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH
TSANAWIYAH AS'ADIYAH CABANG NO.6 KECAMATAN
MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR**



IAIN PALOPO

SKRIPSI,

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Program Studi Pendidikan
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

NUR ALIYAH BIN FAUZIAH
NIM 12.16.2.0033

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2016**

**KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH LUWU TIMUR TERHADAP
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH
TSANAWIYAH AS'ADIYAH CABANG NO.6 KECAMATAN
MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Program Studi Pendidikan
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

NUR ALIYAH BIN FAUZIAH
NIM 12.16.2.0033

Dibimbing oleh :

1. Dr. Mahadin Saleh, M.si. (Pembimbing I)
2. Dr. kartini, M.Pd. (Pembimbing II)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2016**

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah swt., karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman .

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan bantuan orang lain untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini, penulis yakin bahwa tidak akan menyelesaikannya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Olehnya itu melalui kesempatan yang baik ini penulis memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Abd. Pirol., M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri ((IAIN) Palopo, Wakil Rektor I (Dr. Rustam S.M.hum.), Wakil Rektor II (Dr. Ahmad Syarief Iskandar SE.MM.), Wakil Rektor III (Dr. Hasbi, M.Ag.), yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu

pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini.

2. Drs. Nurdin Kaso., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Wakil Dekan I (Dr. Muhaemin., MA), Wakil Dekan II (Munir Yusuf., S.Ag.,M.Pd) dan Wakil Dekan III (Dra. Nursyamsi., M.Pd.I), yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan Studi selama mengikuti Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Siti Marwiyah., M.Ag, selaku ketua Jurusan Tarbiyah, Mawardi., S.Ag., M.Pd.I., selaku ketua program studi PAI IAIN Palopo, dan Fitri Anggraeni., SP, selaku pegawai yang banyak membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi
4. Dr. Mahadin Shaleh, M.si. selaku pembimbing I dan Dr. Kartini, M.Pd. selaku pembimbing II, ibunda Dra. Nursyamsi, M.Pd.I, selaku penguji I, Dra. Baaderiah, M.Ag. selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Para Dosen dan pegawai di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang selama ini banyak memberikan motivasi dan semangat dalam menghadapi segala tantangan selama proses perkuliahan.
6. Dr. Masmuddin., M.Ag., selaku kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang selama ini banyak membantu dalam memfasilitasi referensi yang dibutuhkan baik dalam proses penyelesaian tugas perkuliahan maupun penyelesaian skripsi.

7. Kepala Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili Serta guru-guru yang telah banyak membantu atas waktu dan informasi yang telah diberikan selama di sekolah.
8. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda H. Suaib Lahadeng dan Ibunda Hj. Tira yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, yang telah mengajari butir-bitur kesetiaan dan pengorbanan, banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis baik secara moril maupun secara materil. Sungguh penulis sadar bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt., Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.
9. Kelima saudara Penulis yang tercinta kakanda Ibrahim, Abd. Rahman, Adrian, Suhera, Isnaeni dan Haris yang selalu memberikan motivasi agar penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan studi di IAIN Palopo.
10. Kepada Seluruh teman seperjuangan program studi PAI B angkatan 2012:. yang mau menerima ke kurangan penulis, yang telah memberikan dorongan, motivasi dan inspirasi serta semangat dalam penyusunan skripsi.
11. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah mendapatkan pahala dari Allah swt., Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Palopo, November 2015
Penulis

Nur Aliyah Bin Fauziah

ABSTRAK

Nur Aliyah Bin Fauziah, 2016. *“Kontribusi Pemerintah Luwu Timur terhadap Perkembangan Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Cabang No.6 Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”* . **Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan.** Pembimbing I Dr.Mahading Saleh, M.Si. dan pembimbing II Dr. Kartini, M.Pd.

Kata kunci: Kontribusi Pemerintah terhadap Perkembangan Pendidikan Agama Islam.

Permasalahan pokok pada penelitian ini, yaitu peran pemerintah Luwu Timur terhadap perkembangan pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Cabang No.6 Kecamatan Malili dan kontribusi pemerintah Luwu Timur terhadap perkembangan pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Cabang No.6 Kecamatan Malili .

Penelitian ini bertujuan: a. Untuk mengetahui peran Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Cabang No.6 Kecamatan Malili dalam mengembangkan pendidikan Islam b. Untuk mengetahui kontribusi pemerintah Luwu Timur terhadap perkembangan pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Cabang No.6 Kecamatan Malili.

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena atau kejadian yang dialami oleh subjek penelitian dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui *library research* dan *field research*, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pedagogik, dan sejarah. Analisis data yang digunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Mts As’adiyah Malili dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam dibagi menjadi dua aspek, yaitu upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal mencakup: a). peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui penataran,memperbanyak membanca buku, aktif dalam kegiatan organisasi profesi pendidik seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Upaya eksternal mencakup: a) mengadakan kunjungan ke sekolah lain, b) menjalin komunikasi dengan orang tua

atau wali siswa, c) merevitalisasi peran komite sekolah. 2) Kontribusi pemerintah Luwu timur terhadap perkembangan pendidikan agama Islam di Mts As'adiyah Malili antara lain: a) menata profesionalisme guru melalui beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalisme guru antara lain: workshop keterampilan mengajar yang diadakan oleh dinas pendidikan kebudayaan, pariwisata, pemuda olahraga (Dikbudparbudora) Kabupaten Luwu Timur yang diikuti oleh dua guru Mts As'adiyah Malili, workshop pendalaman materi untuk meningkatkan kompetensi guru, selain itu kebijakan dinas pendidikan kecamatan malili untuk mengaktifkan kembali musyawarah guru mata pelajaran. Selanjutnya peran pemerintah dalam memberikan kontribusi positif dalam pengembangan guru pendidikan agama islam yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru yang belum menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Khususnya di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili yang melanjutkan pendidikannya yaitu wahidah Abdullah di STAIN Palopo Tahun 2014. b) memperbaiki fasilitas pendidikan, Mts As'adiyah Malili mendapat bantuan dana gratis dari Pemda Luwu Timur tahun anggaran 2015-2016 sebesar Rp. 66.360.000,00, dana hibah dari Pemda Luwu Timur anggaran 2015 untuk Mobiler 4RKB senilai Rp. 130.300.000,00 yang sementara tahap pelaksanaan. Selain dana RKB, juga mendapatkan buku dari dinas pendidikan Kabupaten Luwu Timur. c) pemberdayaan komite sekolah. . Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa kontribusi pemerintah Luwu Timur terhadap perkembangan pendidikan agama islam di Mts As'adiyah malili cukup memadai, hanya saja masih ada yang harus diperhatikan dari segi lain, sehingga pengembangan pendidikan Agama Islam di madrasah tersebut lebih berkembang lagi,

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti, pemerintah dan semua pihak yang terkait.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	
	A. Latar Belakang Masalah.....	
	B. Rumusan Masalah	
	C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
	D. Defenisi Oprasional dan Ruanglingkup Pembahasan.....	8
BAB II	KAJIAN PUSTAKA.....	
	A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	
	B. Kajian Pemerintah terhadap Madrasah.....	
	1. Madrasah pada awal kemerdekaan.....	
	2. Madrasah pada awal orde baru.....	16
	3. Madrasah pada orde reformasi.....	19
	4. Pengembangan profesionalisme guru.....	
	C. Kerangka Fikir.....	
BAB III	METODE PENELITIAN.....	
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	
	B. Lokasi Penelitian.....	
	C. Sumber Data.....	
	D. Instrumen Penelitian.....	
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	
	F. Teknik Pengolahan Data	
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	
	B. Kondisi Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili dalam mengembangkan pendidikan agama Islam.....	

C. Kontribusi Pemerintah Daerah Luwu Timur terhadap perkembangan pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.....

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....

B. Saran-Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses kehidupan masyarakat yang bercita-cita semakin maju, dimana pendidikan berada dalam proses kehidupan tersebut mengandung ciri-ciri bersifat mengarahkan terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam proses pendidikan inilah terdapat berbagai masalah menyangkut kebijaksanaan, strategi, dan penyelenggaraannya dengan berbagai sarana dan prasarana, baik fisik maupun non fisik. Dan permasalahan menyangkut proses pendidikan itu tidak berhenti selama manusia itu sendiri masih bercita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupannya. Itulah sebabnya maka pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan itu berlangsung selama hayat manusia adalah wajar dijadikan strategi pendidikan Nasional Indonesia. Dan konsekuensinya ialah bahwa pendidikan itu tidak hanya berlangsung di lingkungan formal (di sekolah) melainkan juga harus dilangsungkan di luar sekolah (non formal) baik bagi anak sebelum masa sekolah maupun bagi mereka yang telah berusia dewasa atau lanjut.

Pendidikan menjadi prioritas utama dilaksanakan karena pada kenyataannya merupakan faktor penentu bagi perkembangan umat. Abdur Rahman Assefag menyatakan bahwa Islam yang diyakini sebagai agama yang paling sempurna, menetapkan pendidikan sebagai aspek sangat penting yang mewajibkan umatnya menuntut ilmu, tidak ada jalan lain untuk memperbaiki keterpurukan umat Islam selain menyusun sistem pendidikan yang berakar pada nilai-nilai, prinsip-prinsip,

dan tujuan-tujuan Islam.¹ Lebih lanjut Abd. Rahman Getteng menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah proses penciptaan Individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw.. Melalui proses pendidikan, individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi supaya mampu menunaikan kebahagiaan dunia dan akhirat.² Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu mencapai derajat takwa, karena hanya orang yang bertakwalah yang mendapat tempat yang paling mulia di sisi Allah swt., sebagaimana firman- Nya dalam QS. Al-Mujadilah/58:11.

pk□□r'~»t□ tûiï%©!\$# (#bqãZtB#uä #s□î) □@□ï% öNä3s9\$ (#qßsiixÿs? □îû Ä\$î=»yfyjø9\$# (#qßs|iøù\$\$\$sù Êx|iøÿt□ ã!\$# öNä3s9 (#s□î)ur □@□ï% (#râ□à±S\$# (#râ□à±S\$\$\$sù Æisùö□t□ ã! \$# tûiï%©!\$# (#qãZtB#uä öNä3ZİB tûiï%©!\$#ur (#qè?ré& zOù=ìèø9\$# ;M»y_u□y□ 4 ã!\$#ur \$yJî/ tbqè=yj÷ès? ×x□î7yz ÇÊÊÊ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³

1 Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia* (cet 1; Yogyakarta; Suka Press, 2013), h.i.

2 Lihat Abd. Rahman Getteng, *Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan* (tinjauan Histori dari Tradisonal Hingga Modern) (Yogyakarta; Graha Guru,2005), h.15.

3 Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet I; Jakarta, Darus Sunnah,2013), h.35

Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia adalah suatu kenyataan yang sudah berlangsung sangat panjang dan sudah bermasyarakat. Pada masa penjajahan belanda dan pendudukan Jepang, Pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat latihan-latihan lain. Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Republik Indonesia.⁴

Pada dasarnya Pendidikan agama Islam menjadi tanggung jawab pusat-pusat pendidikan meliputi keluarga, sekolah dan pemerintah serta masyarakat. Ketiga pusat pendidikan ini saling berkaitan dan saling membantu. Ketidakpedulian salah satu diantaranya menjadi problem serius bagi perkembangan pendidikan agama Islam (PAI) pada masa yang akan datang. Meskipun keberadaan pendidikan Islam sering luput dari perhatian, namun keberadaan PP No. 19 tahun 2005 dan PP RI tahun 2007 secara signifikan memberikan peluang dan perhatian besar pemerintahan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas Pendidikan agama Islam. Pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu standar isi, standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar

⁴ Timur Djelani, *Kebijakan pembinaan Kelembagaan Agama Islam* (Jakarta; Depag RI 1983/84), h.2

penilaian pendidikan.⁵ Pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah juga mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan Keagamaan, bahwa pendidikan Islam dapat diklasifikasikan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan semua jenjang dan jalur pendidikan. *Pertama*, pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan. *Kedua*, pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal, dan non formal, serta informal. *Ketiga*, pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal, dan non formal serta informal.⁶

Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah diarahkan pada peningkatan mutu relevansi pendidikan agama Islam pada sekolah dengan perkembangan kondisi lingkungan lokal, nasional, dan global, serta kebutuhan peserta didik. Kegiatan dalam rangka pengembangan kurikulum adalah pembinaan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tingkat satuan pendidikan.

Pemerintah pada masa orde lama yang dimaksudkan kepada rentang waktu 1945 sampai dengan 1965 diberi tugas oleh UUD 1945 untuk mengusahakan agar

⁵ Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan*, (jakarta: Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2006) h.154.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Bab II dan III, h.2-10.

terbentuknya satuan sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional. Oleh karena itu, sejarah mencatat bahwa pemerintah orde lama memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pemerintah memandang bahwa agama sebagai landasan spritual, moral, dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat, agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara.

Secara khusus pendidikan Islam bertanggung jawab atas kelangsungan tradisi keislaman dalam arti yang seharusnya. Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan tentang pendidikan dapat dilihat bahwa posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional meliputi : pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, sebagai lembaga, dan nilai. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran adalah diberikan mata pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah mulai dari Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi. Kedudukan mata pelajaran ini semakin kuat dari satu fase ke fase yang lain.

Kontribusi pemerintah daerah sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah. Salah satu kontribusi pemerintah daerah terhadap pendidikan Agama Islam di Luwu Timur adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Tomoni. Pemerintah memperhatikan fasilitas pendidikan seperti rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak dan pembangunan gedung baru yang permanen. Upaya pemerintah dalam memperdayakan peserta didiknya, baik melalui perbaikan sarana prasarana sekolah, peningkatan mutu pembelajaran dan beasiswa.

Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili didirikan dengan tujuan membentuk manusia muslim seutuhnya sebagai generasi bangsa dan warga masyarakat. Kondisi pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili berkembang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili sebagai wadah untuk mewujudkan generasi unggul dalam prestasi berdasarkan iman, dan takwa. Hanya saja, pada sisi tertentu membutuhkan bantuan Pemerintah Luwu Timur baik dari segi fasilitas, sarana dan prasarana. Berdasarkan hal tersebut maka judul peneliti adalah : "KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH LUWU TIMUR TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH TSANAWIYAH AS'ADIYAH CABANG NO. 6 KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR"

B. Rumusan Masalah

Masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili dalam mengembangkan pendidikan agama Islam?
2. Bagaimana bentuk kontribusi Pemerintah Luwu Timur terhadap perkembangan pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili ?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili dalam mengembangkan pendidikan agama Islam.
2. Untuk mengetahui kontribusi pemerintah Luwu Timur dalam pengembangan Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan dapat memberi sumbangan pikiran kepada pihak yang berkepentingan terutama para peminat dan peneliti ilmu-ilmu kependidikan Islam, juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan untuk semua pihak, terutama para penentu kebijakan dalam bidang pendidikan Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah informasi untuk dipertimbangkan dalam memperkaya teori pendidikan Islam. Teori pendidikan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat berguna untuk diterapkan pada lembaga pendidikan yang mempunyai tipologi sama atau kurang lebih sama dengan Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili.

E. Defenisi Operasional dan Fokus Penelitian.

1. Defenisi Operasional

Peran pemerintah dalam mengembangkan pendidikan Islam yang dalam penelitian ini adalah segala bentuk kebijakan dan upaya pemerintah baik pemerintah kecamatan maupun kementrian agama Kabupaten Luwu Timur dalam mengembangkan pendidikan Islam di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, penelitian ini adalah studi empiris tentang peranan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan Islam khususnya di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili serta bagaimana kondisi Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili dalam mengembangkan pendidikan Islam.

2. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini meliputi: peran Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili dalam mengembangkan pendidikan Islam, dan kontribusi pemerintah Luwu Timur terhadap perkembangan pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini bertujuan untuk mendapatkan bahan berbandingan dan acuan. Selain itu menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini, penelitian mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

1. M. Subair U, mahasiswa S1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan judul Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam telah diterbitkan berbagai kebijakan tentang perbaikan pendidikan Islam, diantaranya madrasah wajib belajar, masa orde baru kebijakan pemerintah dengan penegerian Madrasah (MIN, MTSN, DAN MAN) dan masa reformasi dengan munculnya universitas-universitas Islam dengan negeri yang

tidak hanya bernaung dibawah menteri agama dan Kementrian pendidikan Nasional yang memungkinkan Islam dapat perhatian dari berbagai pihak tanpa menonjol dikotomi dan agama.⁷

2. Hinayah, *Pendidikan Agama Islam di Desa Lauwo Kecamatan Burau: Perspektif Tri Pusat Pendidikan*,(2010). Hasil penelitiannya “mengemukakan penting peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Islam di Desa Lauwo Kecamatan Burau”.⁸

Penelitian pertama mengkaji kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam dan dinamika pendidikan Islam Pacsa kemerdekaan. Sementara penelitian kedua mengkaji gambaran pendidikan Islam di Desa Lauwo Kecamatan Burau. Relevansi penelitian ini semuanya mengkaji tema pendidikan Islam sebagai fokus kajian, terkait bahwa, penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Dimana penelitian ini difokuskan pada Kontribusi pemerintah daerah terhadap perkembangan pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Cabang No.6 Malili Kabupaten Luwu Timur.

B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Madrasah di Indonesia

1. Madrasah pada awal Kemerdekaan

Madrasah di Indonesia merupakan fenomena modern yang muncul awal abad 20. Berbeda dengan di Timur Tengah, madrasah di Indonesia mengacu pada lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran agama Islam tingkat rendah dan

⁷ M. Subair U, *Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam*, (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2013).

⁸ Hinayah, *Pendidikan Agama Islam di Desa Lauwo Kecamatan Burau: Perspektif Tri Pusat Pendidikan*, (Palopo: Skripsi Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo,2010)

menengah. Menurut Abdul Rachman Saleh, tumbuhnya madrasah di Indonesia adalah hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (tradisional) di suatu sisi dengan pendidikan Barat di sisi lain.⁹ Dibandingkan dengan keberadaan pendidikan Islam zaman Hindia Belanda, kondisi pendidikan Islam pada masa pendudukan Jepang menggembirakan meskipun hanya sebatas pengakuan politis belaka demi mencuri simpati rakyat Indonesia.¹⁰

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, banyak perubahan terjadi dalam bidang pemerintahan dan pendidikan menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Misalnya, bidang pendidikan mengalami perubahan terutama pada landasan idil, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar bagi rakyat Indonesia.¹¹ Oleh sebab itu, Menurut Zahara Idris, diskriminasi dan pembatasan pemberian pendidikan disebabkan perbedaan agama, latar belakang sosial, ekonomi dan golongan tidak dikenal lagi. Dengan demikian, setiap anak Indonesia dapat memilih sekolah sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.¹²

Kebijakan pemerintah Orde Lama berkaitan dengan pendidikan Islam patut disyukuri meskipun tidak memuaskan banyak kalangan umat Islam.

⁹ Ibid., h.12.

¹⁰

¹¹ Dalam UUD 1945 pasal 31 berbunyi: "Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran".

¹² Zahara Idris, Dasar-dasar Kependidikan, (Bandung: Angkasa, 1981), h.30

Penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah setelah Indonesia merdeka, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa: Madrasah dan pesantren adalah salah satu alat dan sumber pencerdasan rakyat jelata yang sudah nyata berupa tuntunan dan bantuan dari pemerintah.¹³

Hasil keputusan BPKNP antara lain sebagai berikut:

- a. Pelajaran agama dalam sekolah diberikan pada jam pelajaran di sekolah.
- b. Para guru dibayar oleh pemerintah.
- c. Pada sekolah dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas IV.
- d. Pendidikan itu diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu,
- e. Para guru diangkat oleh Depag,
- f. Para guru agama diharapkan juga cakap dalam pendidikan umum,
- g. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama,
- h. Diadakan pelatihan bagi para guru agama,
- i. Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki,
- j. Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.¹⁴

Berdasarkan rekomendasi BPKNP, tampak bahwa jangkauan pendidikan Islam sangat terbatas pada sekolah-sekolah mulai kelas IV. Selain itu, pendidikan Islam dalam lembaga pendidikan pesantren dan madrasah belum mendapat perhatian serius. Dalam konteks lain, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa materi (kurikulum) pendidikan agama sebagai pengantar budi pekerti saja, ia tidak

¹³ A. Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, (Jakarta: Dermaga, 1980), h.135.

¹⁴ Maskun, *op.cit.*, h.127, pada tahun 1946, atas perjuangan kaum Muslim di BPKNIP, pendidikan agama dapat diberikan pada sekolah dengan syarat apabila sekolah tersebut memiliki sekurang-kurangnya 10 siswa Muslim.

setuju dengan pendidikan agama sebagai pengantar fiqh secara umum dalam agama Islam.¹⁵ Pada periode ini, pendidikan agama Islam dalam konteks yang lebih mendalam dan terperinci belum mendapat tempat. Tampaknya, sebahagian tokoh nasional lebih fokus untuk membangun jiwa nasionalisme kebangsaan bagi bangsa Indonesia.

Pada tahun 1951, sesuai dengan Ketetapan Menteri agama 15 Februari 1951, kedua Madrasah keguruan tersebut diatas diubah namanya SGAI menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGHAI menjadi SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama). PGA Negeri didirikan di Tanjung Pinang, Kota Raja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung dan Pamekasan.¹⁶ Jumlah PGA pada tahun ini sebanyak 25 dan tiga tahun kemudian, 1954, berjumlah 30. Sedangkan SGHA pada tahun 1951 didirikan di Aceh, Bukit Tinggi dan Bandung.¹⁷

Salah satu kebijakan Departemen Agama RI, berkaitan dengan madrasah pada tanggal 1 September 1956 cukup signifikan. Hal tersebut berkaitan dengan tiga tugas pendidikan agama, yakni memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir, memberi pengetahuan umum di Madrasah, dan mengadakan Pendidikan Guru Agama serta Pendidikan Hakim Islam Negeri. Tugas pertama

¹⁵ Karel Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun Moderen*, (Jakarta:LP3ES,1994), h.90.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya 1968), h.361

¹⁷ Maskum, *op.cit.*, h.125-126

dan kedua dimaksudkan untuk upaya konvergensi pendidikan dualitas, sedangkan tugas yang ketiga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Departement Agama itu sendiri.¹⁸ Dapat disimpulkan dari gambaran tersebut di atas bahwa ada dua hal yang penting berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. *Pertama*, pengembangan dan pembinaan madrasah. *Kedua*, pendidikan Islam di sekolah umum.

Madrasah sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang No. 4 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 10 menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang diakui Departemen Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar.¹⁹ Untuk tujuan tersebut, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum.²⁰

Jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan madrasah terdiri atas tiga jenjang yakni Madrasah Ibtidaiyah (6 tahun), Madrasah Tsanawiyah pertama (4 tahun) dan Madrasah Tsanawiyah Atas (4 tahun). Sedangkan kurikulum yang

¹⁸ Karel A. Steenbrink, *op.cit.*, h.87

¹⁹ *Ibid.*, h.98

²⁰ Dengan persyaratan tersebut, diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat. Pada Tahun 1954, madrasah yang terdaftar di seluruh Indonesia berjumlah 13.849 dengan rincian Madrasah Ibtidaiyah 1057 dengan jumlah murid 1.927.777 orang, Madrasah Tsanawiyah 776 buah dengan murid 87.932 orang, dan Madrasah Tsanawiyah Atas (Aliyah) berjumlah 16 buah dengan murid 1.881 orang. Lihat, Tim Penyusunan Departemen Agama, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta:DEPAG RI, 1986), h.77-78.

diselenggarakan terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Menurut Karel Steenbrink, rumusan kurikulum seperti bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup hanya mengajarkan pendidikan agama dan untuk menjawab kesan tidak baik yang melekat pada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah negeri/umum.²¹ Jadi, pada periode ini, masih ada kesan kurang baik yang melekat pada pendidikan madrasah.

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendirinya untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendirinya oleh Depertemen Agama menjadi jaminan strategi bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.²²

Pada tahun 1951, sesuai dengan Ketetapan Menteri Agama 15 Februari 1951, kedua madrasah keguruan tersebut di atas diubah namanya. SGAI menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGHAI menjadi SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama).²³ Pada tahun 1951, PGA Negeri didirikan di Tanjung Pinang, Kotaraja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung, dan

21 Karel Steenbrik, *op. cit.*, h. 97-98.

22 Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 352

23 *Ibid.*, h. 351.

Pamekasan. Jumlah PGA pada tahun 1951 sebanyak 25. Pada tahun 1954, berjumlah 30. Sedangkan SGHA pada tahun 1951 didirikan di Aceh, Bukit Tinggi dan Bandung. Pada masa H.M Arifin Tamyang menjadi kepala “Jawatan Pendidikan Agama” adalah badan yang merupakan pengembangan dari bagian pendidikan di Departemen Agama. Ketentuan-ketentuan tentang PGA dan SGHA diubah. PGA yang 5 tahun diubah menjadi 6 tahun, terdiri dari PGA Pertama 4 tahun dan PGA Atas 2 tahun.

2. Madrasah pada Orde Baru

Orde baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden Soeharto ke presidenan Habibie pada 21 Mei 1998. Peralihan dari orde lama ke orde baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kewajiban pendidikan nasional. Pada dasarnya Orde Baru adalah suatu korelasi total terhadap Orde Lama yang didominasi oleh Pki dan dianggap telah menyelewengkan pancasila.

Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan. Yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 1973-1978 dan 1983 dalam sidang MPR yang kemudian menyusun GBHN.²⁴

Selain itu, dalam Pelita IV dibidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan. Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan kepada

²⁴ *Ibid.*, h. 354

Tuhan Yang Maha Esa harus semakin dijamin baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama Islam yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas Negeri.

Kebijakan pemerintah orde baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an sampai dengan 1990-an. Pada pemerintah, lembaga pendidikan di kembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pada awal-awal masa pemerintahan orde baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama. Pada tahapan ini, madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan menteri agama.

Menghadapi kenyataan tersebut di atas, langkah pertama dalam melakukan pembaruan ini adalah di keluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai respon terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi Madrasah.²⁵

Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun di awal-awal tahun 1970-an, justru kebijakan pemerintah

²⁵ *Ibid.*, h. 356

terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan Presiden nomor 34 tanggal 18 April 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dalam latihan. Isi keputusan mencakup tiga hal:

- a. Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan.
 - b. Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.
 - c. Ketua lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.
- Selanjutnya, kepres No 34 Tahun 1972 ini di pertegas oleh inpers No 15 tahun 1974 yang mengatur operasionalnya. Dalam Tap MPRS Nomor XVII Tahun 1966 dijelaskan “agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional.”²⁶

Persoalan keagamaan dikelola oleh Departemen Agama, sedangkan madrasah dalam TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 adalah lembaga pendidikan otonomi di bawah pengawasan Menteri Agama”. Dari ketentuan ini, Departemen Agama menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum, tetapi jug bersifat kejuruan.dengan keputusan presiden No.34 Tahun 1972 dan in pers 1974, penyelenggaraan pendidikan dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab menteri pendidikan dan kebudayaan.

²⁶ Arhando Togatorov, *Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi*, Artikel ini diunduh pada tanggal 27 Juni 2015.

3. Madrasah pada Orde Reformasi

Pemerintah orde Soeharto menegaskan kembali tujuan dan cita-cita pendidikan nasional dengan dikelurkannya TAP MPR No.II/MPR/1988 dan UU Sistem Pendidikan Nasional, No.2 tahun 1989. Undang-Undang pendidikan yang pertama di masa pemerintahan Soeharto, dan juga Undang-undang pendidikan yang ketiga di Republik ini, setelah sebelumnya telah terbit di zaman Soekarno, yakni Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 tahun 1950 dan UU No. 12/1954. Ketentuan ini menjadi landasan dikeluarkannya UU Pendidikan No. 21 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional ini diundangkan dan berlaku sejak 27 Maret 1989 menetapkan :

- a. Pendidikan Nasional (PN) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 (pasal 2).
- b. PN bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Pasal 4).²⁷
- c. tentang pendidikan dan pengajaran agama, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara UUPP No.4 tahun 1950 dan Undang-Undang No. 12/1954 dengan Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang pendidikan tahun 1950 dan 1954 dinyatakan bahwa ‘dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut’, (pasal 20 ayat 1). Sementara dalam Undang-Undang No. 2/1989, tidak lagi disebutkan ‘dalam sekolah negeri’,

²⁷ Undang-undang No.21 tahun 1989, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika,1989), h.12

yang tidak lagi membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta dalam memberlakukan pelajaran agama. Konsekuensi dari kebijakan ini pada dataran operasional pendidikan telah dikeluarkan beberapa peraturan pemerintah, ditahun berikutnya, yaitu PP (Peraturan Pemerintah) N0.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, PP No. 28 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP No.29/1990 tentang Pendidikan Menengah, dan PP No.30/1990 tentang Pendidikan Tinggi (dan telah disempurnakan PP N0.22/1999). Semua peraturan tersebut mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga pendidikan umum.

Sejak berlakunya Undang-undang No.20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (sub-sistem) dari sistem pendidikan nasional. Sehingga dengan demikian, kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah sebangun dengan kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan nasional secara keseluruhan.

Selain itu Undang-undang ini juga telah memuat ketentuan tentang hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Namun, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLB yang berisi khas berdasarkan agama tertentu tidak diwajibkan menyelenggarakan pendidikan agama lain dari agama yang menjadi ciri khasnya. Inilah poin pendidikan yang kelak menimbulkan polemik dan kritik dari sejumlah kalangan, dimana para siswa dikhawatirkan akan pindah agama (berdasarkan agama Yayasan/Sekolah), karena mengalami pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Kritik itu semakin kencang, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah, No. 29/1990,

yang secara eksplisit menyatakan bahwa sekolah-sekolah menengah dengan warna agama tertentu tidak diharuskan memberikan pelajaran agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Undang-undang N0. 2 tahun 1989 itu dan peraturan tersebut dinilai oleh sebagian kalangan sebagai Undang-undang yang tidak memberikan ruang dialog keagamaan di kalangan siswa. Ia juga memberikan peran tidak langsung kepada sekolah untuk mengkotak-kotakkan siswa berdasarkan agama.

Pada tahun 1994, kebijakan kurikulum pendidikan agama juga ditetapkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Pada jenjang pendidikan SD, terdapat 9 mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Di SMP struktur kurikulumnya juga sama, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian halnya di tingkatan SMU, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pengajaran umum bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi) dan Pendidikan Seni.

Dari sudut pendidikan agama, Kurikulum 1994, hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai rezim Orde Soeharto tumbang di tahun 1998, pendidikan di Indonesia, masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989, dan kurikulum 1994.

B. Pengembangan Profesionalisme Guru

1. Makna Profesional, Profesionalisme, dan Profesionalisasi.

Berbicara mengenai profesional pemikiran akan tertuju pada pekerjaan. Menurut Danin Sudarman, makna professional merujuk pada dua hal. *Pertama*, orang yang menyanggah suatu profesi. Orang yang profesional biasanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan mengabdikan diri pada pengguna jasa dengan disertai rasa tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya. *Kedua*, kinerja atau *performace* seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.²⁸

Profesionalisme berasal dari bahasa Inggris Profesionalisme yang secara teksikal berarti sifat profesional. Menurut Jasin Anwar profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya.

Profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyanggah suatu profesi untuk standar dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesi. Profesionalisasi mengandung makna dua dimensi utama, yaitu peningkatan status dan peningkatan kemampuan-praktis.²⁹

2. Profesionalisme Tenaga Pendidik

²⁸ Udin Syaefuddin Said, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 98

²⁹ Saudagar dan Idrus, *Pengembangan Profesionalitas Guru*, (Jakarta: Gunung Persada, 2009) h. 96-97.

Jabatan tenaga pendidik bukan hanya menuntut kemampuan spesialisasi tenaga pendidik dalam arti menguasai pengetahuan akademik dan kemahiran profesional yang relevan dengan bidang tugasnya sebagai pendidik, tetapi juga tingkat kedewasaan dan tanggung jawab serta kemandirian yang tinggi dalam mengambil keputusan. Kemampuan tersebut membuat tenaga pendidik memiliki nilai lebih dan kewibawaan yang tinggi terhadap peserta didik yang diajarnya. Sesuai dengan nilai social budaya, secara historis tenaga pendidik itu lebih tinggi dalam masyarakat. Tenaga pendidik adalah seorang yang patut dipatuhi, ditiru (diteladani) kata dan perbuatannya. Motif utama menjadi tenaga pendidik bukan imbalan gaji atau kebendaan, tetapi adalah panggilan untuk mengabdikan kepada Tuhan, masyarakat dan kemanusiaan. Kesetiakawanan tenaga pendidik dapat berwujud organisasi tenaga pendidik, baik dalam bentuk asosiasi (persatuan) maupun serikat kerja sama untuk dapat saling membantu dan berusaha meningkatkan kemampuan profesionalismenya serta memperjuangkan kesejahteraan anggotanya.³⁰

3. Pengembangan Profesionalisme Tenaga Pendidik

Menurut Sudarwan pengembangan profesional tenaga pendidik dimaksudkan untuk memenuhi tiga kebutuhan, *pertama*, kebutuhan social untuk meningkatkan kemampuan system pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan sosial. *Kedua*, kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam

³⁰ Ahmad Sanusi dkk, *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan*, (Bandung:PPS IKIP, 1990) h. 54.

rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Dengan demikian tenaga pendidik dapat mengembangkan potensi social dan potensi akademik generasi muda dalam interaksinya dengan alam lingkungannya. Ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan pribadinya, seperti halnya guru membantu peserta didik.³¹

4. Model Pengembangan Guru

Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik secara perorangan, kelompok atau dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga.

Castetter menyampaikan lima model pengembangan untuk guru sebagai berikut:³²

- a) Pengembangan guru yang dipandu secara individual.
- b) Observasi atau penilaian.
- c) Keterlibatan suatu proses pengembagn.
- d) Pelatihan
- e) Pemeriksaan.

Dari kelima model pengembangan guru diatas, model “training” merupakan model pengembangan yang banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta. Pada lembaga pendidikan, cara yang populer untuk mengembangkan kemampuan profesional guru adalah dengan melakukan

³¹ Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru, (Malang: UIN Malang Perss, 2009) h.27.

³² *Ibid.*, h. 96-97.

penataran baik dalam rangka penyegaran maupun kemampuan . cara lain baik dilakukan sendiri-sendiri, diskusi panel, rapat-rapat, symposium, konferensi, dan sebagainya.

Inovasi dalam pendidikan juga berdampak pada pengembangan guru. Beberapa model pengembangan guru sengaja dirancang untuk menghadapi pembaharuan pendidikan.

5. Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2005) menyebutkan beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru sebagai berikut:³³

a) Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru

Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa kualifikasi pendidikan guru adalah minimal S1 dari program keguruan, namun masih ada guru-guru yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karenanya program ini diperuntukkan bagi guruyang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 untuk mengikuti pendidikan S1 atau S2 pendidikan keguruan.

b) Program penyetaraan dan Sertifikasi

Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Hal ini terjadi karena sekolah mengalami keterbatasan atau kelebihan

³³ Makmun, *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*, (Bandung: PPS IKIP,1996)h. 102-103.

guru mata pelajaran tertentu. Sering terjadi kualifikasi pendidikan guru lebih tinggi dari kualifikasi yang dituntut namun tidak sesuai.

c) Program Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi

Program pelatihan yang diusulkan adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu mengacu kepada tuntunan kompetensi. Selama ini pelaksanaan pelatihan bersifat persial dan pengembangan materi seringkali tumpang tindih, menghabiskan banyak waktu tenaga dan biaya serta kurang efisien. Tidak jarang dalam satu tahun seorang guru mengikuti tiga jenis pelatihan sehingga mengganggu kegiatan proses belajar mengajar, sebaliknya tidak sedikit guru yang belum pernah mengikuti pelatihan sekalipun dalam satu tahun. Oleh karenanya pelatihan yang diusulkan adalah pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi (PTBK) yaitu pelatihan yang mengacu pada kompetensi yang akan dicapai dan diperlukan oleh peserta didik, sehingga isi atau materi pelatihan yang akan dilatihkan merupakan gabungan bidang-bidang ilmu sumber bahan pelatihan yang secara utuh mencapai kompetensi.

d) Program Supervisi Pendidikan

Dalam praktik pembelajaran di kelas masih sering ditemui guru-guru yang ditingkatkan profesionalismenya dalam proses belajar mengajar. Sering ada persepsi yang salah atau kurang tepat dimana tugas supervisor dimaknai sebagai tugas untuk mencari kesalahan atau untuk mengadili guru, padahal tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Cirri utama

supervise adalah perubahan kearah yang lebih baik, sehingga proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien.

e) Program Pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)

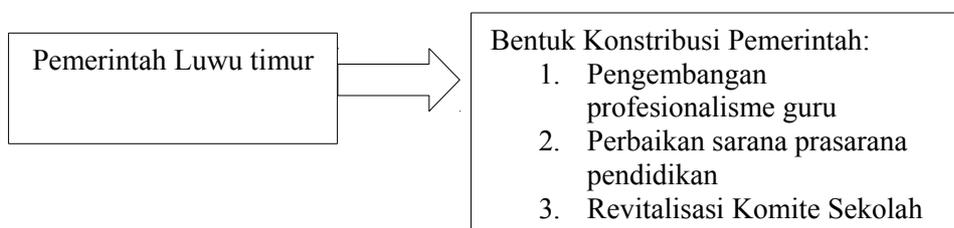
Musyawarah guru mata pelajaran adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sekolah yang terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru SMP dan SMA Negeri atau Swasta yang mengasuh dan bertanggung jawab dalam mengelolah mata pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum.

Guru bertugas mengimplementasikan kurikulum di kelas, guru dituntut bekerja sama secara optimal. Dengan MGMP diharapkan akan meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai kebutuhan peserta didik. Wadah profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan keprofesionalan para anggota.

f) Symposium Guru

Melalui forum symposium guru diharapkan para guru menyebarkan upaya-upaya kreatif dalam pemecahan masalah. Forum ini selain sebagai media untuk berbagi informasi dan pengalaman juga berfungsi untuk kompetensi antara guru, dengan menampilkan guru-guru yang berprestasi dalam berbagai bidang, misalnya dalam penggunaan metode pembelajaran, hasil penelitian tindakan kelas atau penulisan karya ilmiah.

F. Kerangka Pikir





Madrasah Tsanawiyah As'adiyah
Cabang No.6 Malili

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta atau gejala yang ada di lapangan, dengan cara mengumpulkan informasi atau data pada saat penelitian.³⁴

Penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Manaje Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 234

³⁵ Nana Syaodih Sukamdina, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.60.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan sejarah dan pendekatan paedagogis (kependidikan).

1. Pendekatan sejarah adalah pendekatan yang mengkaji pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari tahun ke tahun.
2. Pendekatan paedagogis adalah pendekatan yang berupaya mengkaji tema-tema kependidikan khususnya berkaitan dengan pendidikan agama Islam .

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili Kelurahan Malili Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Jln. Andi Djmma.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kepala Madrasah, guru-guru Madrasah dan staf Madrasah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, skripsi, arsip dan dokumen sekolah yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif "*the researcher is the key instrumen*" atau dengan kata lain, yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri.³⁶

Jadi, peneliti sendiri berfungsi menetapkan masalah penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data dan menafsirkan data serta

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011).hal.307.

membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan tentang topik bahasan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat panduan wawancara. Yang akan menjadi informan dalam wawancara Kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan Staf madrasah.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek yang sedang diteliti.³⁷ Observasi adalah salah satu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek. Kadang-kadang peneliti ikut terlibat langsung pada penelitian yang dimaksud. Tetapi, kadang juga mengambil data dari orang lain.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data melalui catatan tertulis yang berisi data dan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan dokumen madrasah sebagai bahan pelengkap data yang diperoleh dari tata usaha di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili

³⁷ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet, II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.158.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan 3 tahapan dalam penyajian data, yaitu reduksi data, display data, verifikasi data dan mengambil keputusan.

1. **Reduksi data**, diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. Dengan begitu dalam reduksi ini ada proses *living in* dan *living out*, maksudnya data yang terpilih adalah *living in* dan data yang terbuang (tidak terpakai) adalah *living out*.

2. **Display data**, merupakan proses menampilkan data secara sederhana, dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3. **Verifikasi dan simpulan** (*Verification and conclusion*) dalam tahap akhir, simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya kearah simpulan yang mantap. Mengambil simpulan merupakan proses penarikan inti dari data-data yang terkumpul dalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas. Penarikan simpulan bisa jadi masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus-menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih yang lebih jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Tsanawiyah As'Adiyah Malili
Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili Kelurahan Malili

Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Jln. Andi Djmma Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1985 dibuka/didirikan Madrasah As'adiyah Tingkat Tsanawiyah Cabang N0.6 atas permohonan pengurus Cabang Malili, dipimpin oleh Drs. Muh. Saleh Bellu . Kepala sekolah yang pertama adalah Drs. Muh. Saleh Bellu selama 6 bulan digantikan oleh Drs. Muh. Hasbi pada tahun 1985 sampai 1987 digantikan lagi oleh Drs. Abd. Salam. Selanjutnya digantikan oleh H. Mustamin Sitra sampai tahun 2015 digantikan oleh Hj. Nasri Nur Alam sampai sekarang.

Pada tahun 1997 Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili. mendapat Akreditasi “ Disamakan” dari Kanwil Depertemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2007 Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili mendapat sertifikat Akreditasi dari badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peringkat “C” (cukup) tertanggal 30 Desember 2007.

Tahun 2012 Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili mendapat Sertifikat Akreditasi dari badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peringkat “A” (amat baik)) tertanggal 16 November 2012. Mts As'adiyah Malili bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama islam. selain itu, berdirinya sekolah ini dimotivasi adanya keprihatian terhadap kurang efektifnya pendidikan Agama Islam yang berlangsung di sekolah umum. Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili Kelurahan Malili

berupaya memadukan pendidikan umum dengan pendidikan agama dalam konteks yang lebih moderen.

Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili Kelurahan Malili memiliki peluang, hambatan, dan tantangan. Peluang Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili dibanding dengan sekolah umum lainnya adalah program pendidikan agama Islam yang cukup kental dalam proses pembelajaran. Sedangkan hambatan dan tantangannya adalah belum sepenuhnya teruji dalam proses pembelajarannya dan kondisi finansial yang harus diatasi layaknya sebagai sekolah swasta . Meskipun demikian, sekolah ini tetap saja menarik perhatian masyarakat muslim khususnya di Kecamatan Malili.

Program pemerintah melalui bantuan operasional sekolah (BOS) serta program bantuan peserta didik miskin (BSM) bagi Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili sangat membantu berjalannya program pendidikan di sekolah. Berbagai kegiatan keagamaan dilakukan pada proses belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili, misalnya pesantren kilat, pelatihan shalat jenazah dan keterampilan ibadah praktis seperti berwudhu dan bertayamum.³⁸

2. Keadaan Objektif Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Upaya peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di Mts As'adiyah Malili terus dilakukan dengan berbagai pola pengembangan, antara lain upaya

³⁸ Nur hasanah syarifuddin, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 6 Mei 2016 di ruang guru.

kualifikasi dan peningkatan tenaga pengajar, pengembangan saran dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, dan seleksi guru-guru yang akan menjadi tenaga pengajar, peningkatan mutu dan manajemen penyelenggaraan pendidikan serta upaya-upaya lainnya sebagai pendukung peningkatan mutu pendidikan.

Guru dan peserta didik adalah suatu faktor yang sangat penting dalam proses pendidikan dan tanpa kedua faktor tersebut, maka pendidikan tidak dapat berlangsung dan keduanya tidak dapat diganti dengan faktor lain. Guru memegang peran penting dalam proses perkembangan peserta didiknya dan segala harapan peserta didiknya akan bertumpu untuk mengembangkan pengetahuan dan perilakunya, gurulah yang menjadi benteng utama dalam menggerakkan peserta didiknya melalui proses pengajaran dan latihan. Oleh karena itu, eksistensi guru terhadap keberadaan peserta didik sangat memberikan nilai positif terhadap perkembangan peserta didik, ditinjau dari berbagai sudut pandang pendidikan keberadaan guru selain sebagai motivator, mediator dan juga sebagai sang eksekutor dalam menerapkan dan mengembangkan potensi peserta didik dalam meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik di sekolah. Dengan demikian, guru adalah suri tauladan dalam hal pembentukan sikap dan perilaku anak, serta proses belajar mengajar. Pencapaian prestasi sangat ditentukan oleh guru. Jadi, kunci keberhasilan peserta didik adalah ditentukan oleh kualitas guru itu sendiri dalam menyampaikan dan mentransfer ilmu pengetahuan.

Eksistensi guru dalam dunia pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan potensi peserta didik. Oleh karena itu, kualitas guru sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian prestasi hasil

belajar peserta didik, guru harus mempunyai kualitas, kapabilitas, dan tentunya kualitas intelektual guru yang akan menjadi sumber referensi ilmu.

Tabel 4.1
Data Guru Mts As’adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

No	Nama	Jenjang Pendidikan	Jabatan
1	Hj. Nasri Nur Alam, S.Pd.I	S1	Kepala Sekolah
2	Dra.Hj. Nurlaela	S1	Wakil kepala Sekolah
3	Wahida Abdullah,	S1	Guru
4	Nur Hasanah syarifuddin, S.Pd.I	S1	Guru
5	Mariana, S.sos	S1	Guru
6	Rahmi, S.Ag	S1	Guru
7	Rahman, S.Hi	S1	Guru
8	Gustiana, S.Pd	S1	BK
9	Marwati, S.Pd	S1	Guru
10	Kartini, S.Kom	S1	TU
11	Robby, S.Pd.I	S1	Guru
12	Erni Safitri, S.Pd	S1	Guru
13	Abd. Aziz, A.Md	D2	Guru
14	Irwin Amrulah, S.Pd	S1	Guru
15	Herni yanti, S.Pd	S1	Guru

Sumber Data: Mts As’ Adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, 2016.

3. Keadaan Peserta didik Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Cabang No.6 Malili

Selain guru, peserta didik merupakan faktor penentu dalam suatu proses pembelajaran. Siswa adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tua kepada guru untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia dan mandiri. peserta didik juga merupakan organisme yang unik, berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan peserta didik adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing peserta didik pada setiap aspek tidak selalu sama. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan peserta didik yang tidak sama itu, di samping karakteristik lain yang melekat pada dirinya.

Tabel 4.2
Keadaan siswa Mts As’adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur 2016

NO	KELAS	JUMLAH SISWA		jumlah
		L	P	
1	VII: (A)	6	24	30
	VII: (B)	8	20	28
2	VIII : (A)	10	19	29
	VIII : (B)	6	22	28
3	IX : (A)	7	23	30
	IX : (B)	8	21	29
Jumlah		45	129	174

4. Sarana dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Cabang No.6

Malili

Sekolah merupakan sarana pendidikan atau suatu lembaga yang diselenggarakan oleh sejumlah orang atau kelompok dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain guru, siswa, dan pegawai, sarana maupun prasarana, juga merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Fasilitas yang lengkap akan menentukan

keberhasilan suatu proses belajar mengajar yang akan bermuara pada tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal.

Kelengkapan suatu sarana dan prasarana selain sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kualitas alumninya, juga akan menambah persentase sekolah di mata orang tua siswa untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi. Proses belajar mengajar tidak akan maksimal jika tanpa dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Oleh karena itu, maksimalisasi antara siswa, guru, sarana dan prasarana harus menjadi perhatian serius.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran di lembaga tersebut dalam usaha sebagai pendukung pencapaian tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana berfungsi untuk membantu dalam proses pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili , khususnya yang berhubungan langsung didalam kelas, serta sarana yang lengkap akan menjamin tercapainya tujuan pembelajaran.

Table 4.3
Keadaan sarana dan prasarana Madrasah Tsanawiyah As'adiyah
Cabang No.6 Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Ruang Belajar/Kelas	9 ruangan
2	Ruang Kepala Sekolah	1 ruangan
3	Ruang Guru	1 ruangan
4	Perpustakaan	1 ruangan
5	Ruang tata Usaha	1 ruangan
6	Kantor	1 ruangan
7	Gudang	1 ruangan
8	WC Guru	1 ruangan
9	WC Siswa	1 ruangan

10	Mushalla	1 ruang
11	Komputer	6 Unit
12	Mes Guru	7 Ruang
13	Kantin	1 Ruang

Sumber Data: TU Mts As'Adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2016.

Sarana dan prasarana Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili, baik secara fisik maupun non fisik hingga sekarang, walaupun diupayakan setiap tahun ajaran diadakan penambahan fasilitas, namun pada kenyataan fasilitas yang tersedia belum mampu mengimbangi jumlah peserta didik yang setiap tahun mengalami peningkatan.

B. Kondisi Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili dalam

mengembangkan Pendidikan Agama Islam

Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili dalam mengembangkan pendidikan agama Islam dapat diidentifikasi menjadi dua upaya yakni usaha internal dan usaha eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya Internal (Faktor dari dalam)

Upaya internal Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili

dalam mengembangkan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal yakni:

a) Peningkatan Kualitas tenaga kependidikan

Guru memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Seorang guru harus mampu menjadi pendidik yang profesional yang mampu membina peserta didik dalam kreativitas dan kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Madrasah, ada beberapa upaya yang diterapkan di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili untuk meningkatkan profesionalisme

pendidik dalam pembelajaran melalui: a) penataran, b) memperbanyak membaca, c) aktif dalam kegiatan organisasi profesi pendidik seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG)³⁹.

1. Mengikuti Penataran dan seminar kependidikan

Menurut para ahli bahwa penataran adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru menyerasikan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang. Misalnya penataran strategi dan metode pembelajaran, penataran model-model pembelajaran, dll. Sedangkan kegiatan penataran itu sendiri di tujukan:

- a. Mempertinggi mutu petugas sebagai profesinya masing-masing,
 - b. Meningkatkan efesiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal
 - c. Dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi kerja, keahlian dan peningkatan terumata pendidikan untuk menghadapi arus globalisasi.⁴⁰
- Bedasarkan wawancara, Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6

Malili telah mengikuti beberapa kegiatan penataran diantaranya mengikuti Seminar dan Bedah buku yang dilakuakn oleh Kemenag Kabupaten Luwu Timur dengan tema “Dimensi Manajemen Pendidikan Islam” (Desember 2015) yang

³⁹ Herni Yanti, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2016 di ruang guru

⁴⁰ Hj. Nasri Nur Alam, Kepala Sekolah Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 6 Mei 2016 di ruang kepala sekolah.

diikuti dua guru Mts As'adiyah Malili. Dan kegiatan workshop yang diadakan oleh dinas pendidikan.⁴¹

2. Memperbanyak Membaca

Menjadi guru profesional tidak hanya menguasai atau membaca dan hanya berpedoman pada satu atau beberapa buku saja, guru yang profesional haruslah banyak membaca berbagai macam buku untuk menambah materi yang akan disampaikan sehingga pendidik tidak akan kekurangan pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat.

3. Meningkatkan pengkajian materi dan penggunaan metode pembelajaran

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan maka peningkatan materi perlu mendapat perhatian karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas pengetahuan peserta didik. Materi yang disampaikan pendidik harus mampu menjabarkan sesuai yang terantum dalam kurikulum. Pendidik harus menguasai materi dengan ditambah bahan atau sumber lain yang berkaitan dan lebih hangat sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi untuk belajar.

Pemakaian metode hendaknya bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh atau monoton. Dalam menyampaikan metode, guru harus memperhatikan hal-hal seperti:

⁴¹ Hj. Nasri Nur Alam, Kepala Sekolah Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 6 Mei 2016 di ruang kepala sekolah.

1) selalu berorientasi pada tujuan, 2) tidak hanya terikat pada suatu alternatif saja, 3) mempergunakan berbagai metode sebagai suatu kombinasi, misalnya: metode ceramah dengan tanya jawab.⁴²

b) Meningkatkan kualitas peserta didik

Peningkatan kualitas pendidikan harus seimbang dengan peningkatan kualitas peserta didik yang akan menjadi out put dari pendidikan. Pendidikan merupakan sarana yang saling menguatkan satu sama lain sebagai wahana proses transformasi.

Dalam rangka menumbuhkan semangat belajar dan mengajar, maka kerja sama antara pihak pemerintah, guru, dan masyarakat, harus betul-betul terjalin untuk mencapai target yang menjadi standart dari pemerintah. Peningkatan kualitas peserta didik, harus diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan, profesionalitas guru, serta wahana untuk mengekspresikan dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik. Kualitas peserta didik merupakan fokus dari seorang guru dan wali murid untuk bersama-sama mengetahui potensi peserta didik, sehingga dapat mengembangkan kearah yang positif baik peningkatan kulitas intelektual, emosional, maupun spiritual, dengan proses belajar mengajar yang transformative, sehingga peserta didik mampu memahami setiap pelajaran yang sesuai dengan tindakan dan perilaku kesehariannya di lingkungan masyarakat, karena pada hakekatnya pendidikan

42 Rahman, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2016 di ruang guru

mengantar para peserta didik menuju kematangan berpikir, bertindak, dan membangun kreatifitas, serta inovasi dalam diri untuk menjadi lebih baik lagi.

Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili. dalam meningkatkan mutu peserta didiknya secara khusus melakukan kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan tarbiyah, penanaman ilmu tajwid, pelatihan shalat jenazah, mengadakan pesantren kilat pada bulan ramadhan, ta'lim yang diadakan selama dua pertemuan dalam sebulan⁴³. Pengembangan mutu peserta didik mulai nampak dilingkungan madrasah. Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili dari tahun ketahun sudah berkembang mulai dari beberapa aspek diantaranya kesadaran pada diri peserta didik untuk melakukan shalat berjama'ah dimushallah, sikap saling tolong menolong, dan menghormati guru-guru, mengucapkan salam bila bertemu dengan teman dan guru dilingkungan madrasah, tidak hanya terbukti dari keseharian peserta didik dilingkungan madrasah, tetapi mutu pendidikan peserta didik juga dibuktikan dengan beberapa prestasi yang dicapai peserta didik pada lomba-lomba antara lain: juara I futsal tingkat Kabupaten, juara II jelajah kota tingkat kabupaten, juara III tandunisasi dan evaluasi tingkat kabupaten, juara III qasidah rabbana tingkat Mts

⁴³ Rahman, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2016 di ruang guru

sekabupaten luwu timur, juara II tilawatilqur'an, dan juara II lomba ceramah (memperingati malam nuzulqur'an).⁴⁴

c. Meningkatkan sarana pendidikan dan pembelajaran

Sarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dari segi sarana tersebut perlu diperhatikan adanya usaha meningkatkan sebagai berikut: 1) Mengerti secara mendalam tentang fungsi atau kegunaan media pendidikan, 2) Mengerti penggunaan media pendidikan secara tepat dalam interaksi belajar mengajar, 3) pembuatan media harus sederhana dan mudah, 4) memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi materi yang akan diajarkan.⁴⁵

2. Upaya eksternal

Upaya eksternal dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili dengan cara mengadakan antara lain:

a. Mengadakan Kunjungan Kesekolah Lain (studi komperatif)

Suatu hal yang sangat penting seorang guru mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga akan menambah wawasan pengetahuan, bertukar pikiran dan informasi tentang kemajuan sekolah lain yang sejenis. Ini akan menambah dan

⁴⁴ Hj. Nasri Nur Alam, Kepala Sekolah Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 6 Mei 2016 di ruang kepala Sekolah

⁴⁵ Rahman, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2016 di ruang guru

melengkapi pengetahuan yang dimiliki guru serta mengatasi permasalahan-permasalahan dan kekurangan yang terjadi sehingga peningkatan pendidikan dapat tercapai dengan cepat.⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili mengadakan kunjungan ke beberapa Madrasah salah satunya MtsN Towitu yang diwakili oleh dua guru.⁴⁷

b. Menjalani komunikasi dengan orang tua atau wali siswa
Mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting sekali,

karena dengan ini guru dan orang tua akan dapat saling berkomunikasi, mengetahui dan menjaga peserta didik serta bisa mengarahkan pada perbuatan yang positif. Karena jam pendidikan yang diberikan di sekolah lebih sedikit apabila dibandingkan jam pendidikan di dalam keluarga. Kepala Penelitian ini Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 membuat buku kontrol yang berfungsi sebagai buku penghubung antara peserta didik dengan orang tua mereka. Buku kontrol tersebut sangat bermanfaat dalam rangka mengetahui perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran dan diwajibkan setiap wali kelas mengetahui nomor handphone orang tua siswanya agar mudah berkomunikasi dengan wali siswa.⁴⁸

c. Merevitalisasi peran komite sekolah

⁴⁶ Herni Yanti, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, wawancara, tanggal 7 Mei 2016 di Mts As'adiyah Malili

⁴⁷ Hj. Nasri Nur Alam, Kepala Sekolah Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, wawancara, pada tanggal 6 Mei 2016 di ruang kepala Sekolah

⁴⁸ Gustiana, Guru, Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, wawancara, pada tanggal 6 Mei 2016 di ruang kepala Sekolah

Komite sekolah dapat diartikan sebagai suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasi, membahas, dan merekomendasikan hal-hal yang menyangkut kepentingan suatu lembaga sekolah atau madrasah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan. Komite sekolah terdiri atas unsur masyarakat yang antara lain: orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, alumni, siswa dan dunia usaha.⁴⁹ Peran komite sekolah dapat diperluas guna mencari peluang untuk mendapat beberapa hal, misalnya: a) faktor dana (*financial*), b) faktor instruktur sekolah, dan c) faktor kualitas tenaga pendidik.⁵⁰

C. Kontribusi Pemerintah Luwu Timur Terhadap Perkembangan Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili

Kontribusi pemerintah sangat penting dalam dunia pendidikan, desentralisasi pendidikan menuju otonomi pendidikan oleh pemerintah luwu Timur dilakukan dengan beberapa cara yakni: 1) menata profesionalisme guru, 2) Memperbaiki Fasilitas pendidikan, 3) merevitalisasi dan memberdayakan komite sekolah.

1. Menata Profesionalisme Guru

Profesionalisme guru sangat berkaitan dengan peran dan fungsi guru dalam kontek pendidikan misalnya tugas pendidik, mengajar, manajerial, dan

⁴⁹ Hj. Nasri Nur Alam, Kepala Sekolah Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 6 Mei 2016 di ruang kepala Sekolah.

⁵⁰ Hj. Nasri Nur Alam, Kepala Sekolah Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 6 Mei 2016 di ruang kepala Sekolah

sebagainya. Profesionalisme guru sangat erat kaitannya dengan kompetensi guru. Guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bantuan dan bimbingan kepada anak didik, dan mempunyai peran yang sangat penting karena guru memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kompetensi atau kemampuan sebagai guru profesional antara lain: Kompetensi pedagogik, Kompetensi sosial, Kompetensi kepribadian, dan Kompetensi Profesional.

Dalam menata kompetensi dan profesionalisme guru Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Kecamatan Malili, yang diwakili oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dikbudparbudora) Kabupaten Luwu Timur dalam wawancara dengan Drs. Ismail kadis dikbudparbudora menyatakan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme guru antara lain: Workshop Keterampilan Mengajar (Malili 2016), Workshop pendalaman materi untuk meningkatkan kompetensi guru (Malili 2016) , Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (januari 2016), Selain itu, juga diaktifkan kembali Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).⁵¹ Kebijakan kementerian agama luwu timur dalam menata profesionalisme guru-guru madrasah dengan adanya sertifikasi bagi guru yang mengajar dan mempunyai SK dari kemenag, sosialisasi pembinaan guru pendidikan agama Islam untuk membina guru-guru pendidikan agama Islam di madrasah, dan diklat pendampingan kurikulum 2013 bagi guru-guru madrasah.⁵²

a. Tugas Educational

51 Drs. Ismail, Kadis Dikbudparbudora, *wawancara*, 23 Agustus 2016.

Tugas educational adalah tugas guru untuk mengembangkan dan meningkatkan sikap mental atau kepribadian anak. Tujuan dari tugas ini adalah untuk meningkatkan sisi afektif. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas ini adalah guru harus mengembangkan siswa memiliki tugas sebagai makhluk individual, sosial, dan agama. Tugas ini dikenal dengan tugas mendidik.

Guru Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili mengembangkan kemampuan mendidik melalui kegiatan non-formal seperti rajin mengikuti pengajian-pengajian, tadarrus Al-Qur'an dan sebagainya. Kegiatan ini biasanya ramai pada bulan suci Ramadhan yang mana melibatkan seluruh guru di kabupaten luwu timur.⁵³

a. Tugas Intruksional

Tugas intruksional adalah tugas pendidik untuk menyampaikan bahan pelajaran sesuai dengan bidangnya. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan sisi intelektual peserta didik. pendidik dituntut harus menguasai materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Perkembangan kemampuan kognitif, kemampuan efektif, dan kemampuan psikomotorik, sehingga anak dapat menjadi manusia yang cerdas, bermoral, baik, dan sekaligus terampil. Tugas guru Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili sebagai pengajar dilakukan melalalui tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

⁵² St. Rabiah, Kepala Seksi Pendidikan Islam, *wawancara*, pada tanggal 20 Agustus 2016.

⁵³ Nur Hasanah Syarifuddin, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2016 di ruang guru

1. Perencanaan

Salah satu indikator penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik adalah yang didalamnya memberi gambaran kegiatan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik. Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili dalam meningkatkan dan menjaga kualitas proses pembelajaran dengan cara mewajibkan guru menyiapkan perangkat pembelajaran berupa rancangan RPP. Setiap guru Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No. 6 Malili harus membuat RPP sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Untuk memberikan motivasi kepada guru, kepala sekolah Madrasah Tsawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili memeriksa kelengkapan administrasi pembelajaran pada awal dan akhir semester. Selain itu, kepala sekolah Mts As'adiyah Malili memberikan bantuan pembelian buku pada setiap guru pada awal tahun pembelajaran.⁵⁴

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas rancangan RPP, kepala sekolah Mts As'adiyah Malili menghimbau kepada guru-guru Mts As'adiyah Malili untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dari kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh guru kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Pelaksanaan pertemuan rutin dilaksanakan di beberapa tempat sesuai dengan kesepakatan para guru yang tergabung dalam kelompok tersebut.⁵⁵ Manfaat pertemuan tersebut sangat signifikan karena para guru dapat saling mengisi dan

⁵⁴ Gustiana, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Mei 2016.

⁵⁵ Hj. Nasri Nur Alam, Kepala Sekolah Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Mei 2016.

tukar informasi mengenai cara mengatasi hambatan dan problem dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas bagaimana cara membuat RPP yang baik akan tetapi juga mendiskusikan segala hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran.⁵⁶

Sebelum pembuatan RPP, guru Mts As'adiyah Malili melakukan pengkajian terhadap beberapa hal misalnya: mengkaji kedalaman materi, mengkaji kemungkinan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, mengkaji penggunaan metode yang tepat, merancang evaluasi pembelajaran.⁵⁷ tahapan tersebut dilakukan guru pada awal program pembelajaran terutama sebelum proses pembelajaran dimulai. Pada proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, kadang-kadang guru merubah strategi yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran berdasarkan situasi dan kondisi.

Beberapa langkah praktis telah dilakukan guru Mts As'adiyah Malili antara lain: menyiapkan dan mengkaji dokumen kurikulum yang digunakan Mts As'adiyah Malili, menyiapkan dan membuat program semester genap dan ganjil berdasarkan kurikulum yang ditetapkan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Guru Mts As'adiyah Malili menyuruh peserta didik untuk membeli buku atau mengusahakan dalam bentuk lain misalnya dalam bentuk copyan, karena buku paket yang tersedia disekolah tidak memadai.⁵⁸

⁵⁶ Gustiana, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Mei 2016.

⁵⁷ Herni Yanti, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Mei 2016.

⁵⁸ Gustiana, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Mei 2016.

Dalam proses pembelajaran, guru Mts As'adiyah Malili mempertimbangkan, tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, ketersediaan fasilitas, kondisi peserta didik, dan alokasi waktu yang tersedia. Dalam konteks ini, para guru telah merencanakan pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah Mts As'adiyah Malili, disimpulkan bahwa pada umumnya guru telah mempersiapkan segala perangkat pembelajaran berupa dokumen RPP, absensi, dan laporan kemajuan peserta didik.⁵⁹

2. Pelaksanaan

Kegiatan proses pembelajaran di Mts As'adiyah Malili pada umumnya melalui proses tahapan yakni kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir.

a. Pada kegiatan awal

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara disimpulkan bahwa pada umumnya para guru Mts As'adiyah Malili melakukan apersepsi, dan Tanya jawab pada awal proses pembelajaran. Sebagian guru menyiapkan hadiah kecil berupa permen bagi siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru.⁶⁰ Pemberian hadiah tersebut meski sifatnya sederhana namun berdampak positif untuk minat belajar siswa.

b. Kegiatan inti

Guru melakukan eksplorasi berupa membaca dan menelaah berbagai literature untuk dapat menjelaskan pengertian tentang akhlak kemudian guru melakukan Tanya jawab dengan siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai akhlak. Setelah itu, guru melakukan elaborasi berupa siswa

⁵⁹ Gustiana, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Mei 2016.

⁶⁰ Hj. Nasri Nur Alam, Kepala Sekolah Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Mei 2016.

membuka LKS/buku paket aqidah akhlak untuk memahami materi yang dijelaskan oleh guru, kemudian guru menjelaskan metode pembelajaran yang digunakan. Setelah itu guru melakukan konfirmasi dengan cara guru melakukan Tanya jawab kepada siswa untuk mengetahui sejauhmana pemahaman siswa pada materi dan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.

c. Kegiatan akhir.

Pada kegiatan akhir, guru Mts As'adiyah Malili melakukan beberapa hal yakni: guru memfasilitasi siswa untuk melakukan refleksi dengan menanyakan apa yang telah dipelajari dan kesulitan yang dihadapi siswa, guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan, guru memberitahukan materi yang akan diajarkan pada pertemuan selanjutnya untuk dipelajari di rumah, guru mengakhiri pertemuan dengan membaca *hamdalah* dan doa bersama kemudian mengucapkan salam dan keluar dari ruang kelas.⁶¹

3. Evaluasi

Pada tahapan ini, guru Mts As'adiyah Malili melakukan dua jenis evaluasi yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Pada evaluasi proses, guru selalu memperhatikan tingkah laku, moral, dan etika siswa khususnya yang berkaitan dengan perilaku keagamaan siswa, misalnya, guru Akidah Akhlak memberikan penekanan bahwa tingkah laku siswa, moral dan etika siswa menjadi penentu dalam keberhasilan pada evaluasi hasil proses pembelajaran.⁶² Mts

⁶¹ Gustiana, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Mei 2016.

⁶² Rahman, Guru Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Mei 2016.

As'adiyah Malili berupaya memadukan tiga tujuan pembelajaran sekaligus yakni aspek *kognitif* (pengetahuan), *psikomotorik* (keterampilan), dan *afektif* (sikap).

Sedangkan pada bidang studi Al-quran hadits, penekanan dan penilaian utama yang menjadi alat ukur adalah kemampuan siswa dalam membaca al-quran dan kemampuan pengetahuan berkaitan dengan materi bidang studi al-quran hadits, siswa juga harus mempunyai kemampuan keterampilan dalam membaca al-quran.⁶³ Evaluasi yang dilakukan untuk mutu akademik pembelajaran PAI, di Mts As'adiyah Malili memadukan hasil belajar dan proses pembelajaran di dalam kelas.

b. Tugas Manajerial

Pendidik berkewajiban mengelolah kehidupan lembaga (kelas atau sekolah yang diasuh oleh guru). Pengelolaan itu meliputi: personal atau anak didik, yang lebih erat berkaitan dengan pembentukan kepribadian anak. Material dan sarana, yang meliputi alat-alat, perlengkapan, media pendidikan dan lain-lain yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Tindakan yang dilakukan, yang menyangkut metode mengajar, sehingga dapat tercipta kondisi yang optimal bagi terlaksananya proses belajar mengajar dan dapat memberikan hasil sebaik-baiknya bagi anak didik.

2. Memperbaiki Fasilitas Pendidikan

Pemerintah memperhatikan fasilitas pendidikan seperti rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak dan pembangunan gedung baru yang permanen. Begitu juga ruang belajar dibuat agar anak didik bisa merasa nyaman dalam

⁶³ Herny, Guru, Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 6 Mei 2016 di ruang kepala sekolah

belajar. Upaya pemerintah dalam memberdayakan peserta didiknya, baik melalui perbaikan sarana fisik sekolah, peningkatan mutu pembelajaran dan beasiswa.

Mts As'adiyah Malili mendapat bantuan Dana gratis dari pemda Luwu Timur tahun anggaran 2015-2016 sebesar Rp. 66.360.000,00. Danah hibah dari pemda Luwu Timur Tahun anggaran 2015 untuk pengadaan Mobiler 4 RKB senilai Rp.130.300.000,00 yang sementara dalam tahap pelaksanaan. Dan infak dari masyarakat pada tahun 2015 sebesar Rp.4.000.000,00. Selain bantuan RKB, Mts As'adiyah Malili juga mendapat bantuan buku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.⁶⁴

3. Pemberdayaan Komite Sekolah

Komite Sekolah dapat diartikan sebagai suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan, membahas dan merekomendasikan hal-hal yang menyangkut kepentingan suatu lembaga sekolah atau madrasah. Oleh karena itu, organisasi ini merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di suatu pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan badan di sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Komite sekolah berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai berikut:

- a) Memberi pertimbangan (*advisory board*)

⁶⁴ Hj. Nasri Nur Alam, Kepala Sekolah Mts As'adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 6 Mei 2016 di ruang kepala sekolah

Komite Sekolah berperan sebagai *advisory* yakni membantu sekolah dalam menyediakan fasilitas belajar, memperbesar dana pendidikan dan mengawasi program serta hasil pendidikan dan mengawasi hasil pendidikan. Peran ini dapat diperluas dalam bentuk perencanaan sekolah, serta pengelolaan sumber daya pendidikan, SDM.

Oleh karena itu komite sekolah berperan sebagai *Advisory Board* dalam merencanakan hal-hal yang berkaitan tentang sarana dan prasarana sekolah yang mendukung berjalannya proses pembelajaran dalam meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik.

b) Memberi dukungan (supporting agency)

Suatu peran yang berusaha memberikan dukungan finansial, pemikiran, tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah atau sekolah, peran komite ini dapat dilaksanakan dalam bentuk memberikan dukungan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pengelolaan anggaran.

Komite Sekolah berperan sebagai pendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dalam hal ini ialah proses pendidikan dan peningkatan prestasi hasil belajar peserta didik.

c) Pengontrol (controlling agency)

Suatu peran yang dimiliki komite dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Peran ini berfungsi mengontrol perencanaan, memantau pelaksanaan program sekolah,

memantau out put program sekolah. Oleh karena itu peran dan fungsi komite sekolah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas peserta didik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontribusi Pemerintah Daerah terhadap perkembangan Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili dilakukan dengan beberapa tiga cara yakni:
 - a. Menata profesionalisme guru
 - b. Memperbaiki fasilitas pendidikan
 - c. Merevitalisasi dan memberdayakan komite sekolah
2. Peran Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Cabang No.6 Malili dalam mengembangkan pendidikan Agama Islam di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dibagi menjadi dua aspek, yakni upaya internal dan upaya eksternal.

Upaya internal mencakup:

 - a. Peningkatan kualitas tenaga pendidikan melalui penataran, kursus pendidikan, meningkatkan pengkajian materi, penggunaan metode pembelajaran.
 - b. Meningkatkan sarana pendidikan dan pembelajaran.

Upaya eksternal mencakup:

 - a. Mengadakan kunjungan ke sekolah lain (studi banding),
 - b. Menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali murid.
- c. Merevitalisasi peran komite sekolah mambantu memperoleh dana

- d. Perbaikan infrastruktur sekolah dan kualitas tenaga pendidik.

3. Saran-saran

Penelitian dengan tema “*Kontribusi Pemerintah Luwu Timur terhadap Perkembangan Pendidikan Agama Islam di Mts As’adiyah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur* “ yang telah dilakukan semoga menjadi sumber ilmu dan pengetahuan bagi semua pihak

Saran penulis untuk pendidik agar mampu membina peserta didik menjadi lebih bermanfaat bagi bangsa nusa dan agama. Terkhusus bagi pemerintah semoga mampu menjadi wadah yang dapat mengembangkan potensi perkembangan pendidikan agama Islam di daerah , baik tempat penelitian maupun daerah lainnya.

Bagi para peserta didik semoga menjadi acuan ilmu dan tidak hanya sebatas acuan ilmu tetapi mampu mengembangkan ilmu yang dimiliki.

